



**LKIP SEKRETARIAT DPRD**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

---

**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-2 pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi,

efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Koba, Januari 2025  
Plt.Sekretariat DPRD,



Yulin, S.E.  
Pembina (IV/a)  
NIP 19761209 200604 2 018

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD tahun 2024. Sekretariat DPRD pada tahun 2024 memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan total 4 (empat) indikator kinerja, dan 4 (empat) target kinerja yang harus dicapai. Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 4 (empat) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 0 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 2 target: dan

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masingmasing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja	2024		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Tercapainya Pelayanan Berkualitas terhadap Anggota DPRD	Meningkatnya kepuasan layanan Terhadap Anggota DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	81	80.2	99.01
2		Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat DPRD	Persentase Hasil Evaluasi RB	74.92	74.86	99.92

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah .....	4
D. Landasan Hukum .....	6
E. Sistematika .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	9
A. Rencana Strategis .....	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2024 .....	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	23
B. Realisasi Anggaran .....	32
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	33
BAB IV PENUTUP .....	36
LAMPIRAN .....	xx
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH .....	xx
MATRIKS RENSTRA .....	xx
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	xx
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH .....	xx

*Bab I Pendahuluan*

*berisi*

- a. Latar Belakang*
- b. Struktur Organisasi dan Tata Kerja*
- c. Isu Strategis Perangkat Daerah*
- d. Landasan Hukum*
- e. Sistematika*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai tugas: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pembinaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai fungsi :

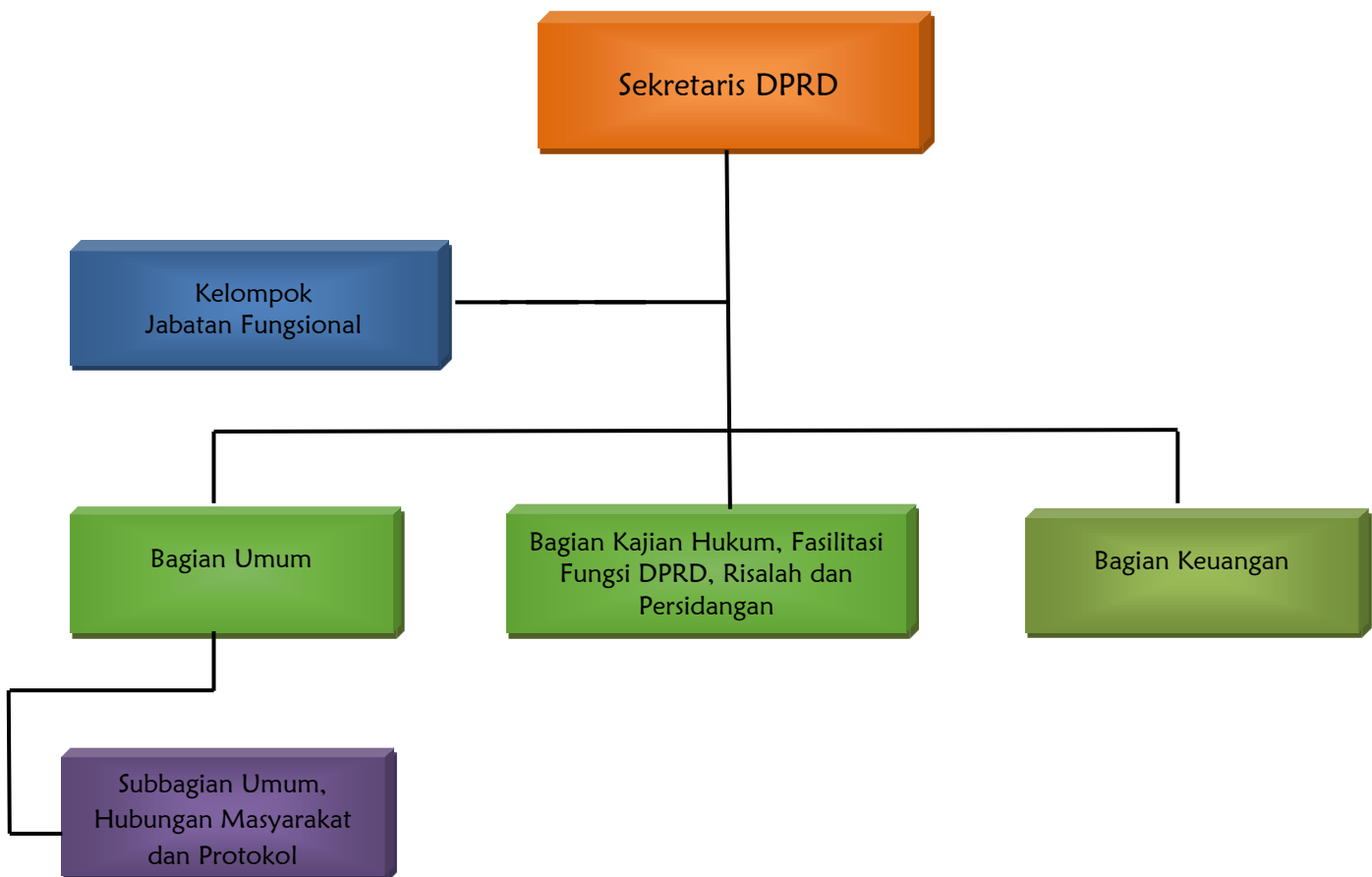
- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Adapun kedudukan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Tengah dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang membawahi 3 (tiga) Bagian, yaitu Bagian Umum, Bagian Keuangan, dan Bagian Kajian Hukum, Fasilitasi Fungsi DPRD, Risalah dan Persidangan. Berikut bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah.

Gambar 1.1.

### STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGKA TENGAH





### C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 sebagai berikut :

Identifikasi terhadap lingkungan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pati menghasilkan faktor-faktor Strategis sebagai berikut:

#### A. Faktor Internal

##### 1. Kekuatan :

- a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup.
- b. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- c. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup.
- e. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

##### 2. Kelemahan :

- a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal
- b. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

- c. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

## B. Faktor Eksternal

### 1. Peluang :

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Tengah.
- b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan
- d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti kemampuan sumber daya aparatur,
- e. Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

### 2. Ancaman/Tantangan :

- a. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
- b. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
- c. Masih banyaknya hambatan – hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

- Terasilitasinya dukungan bagi peningkatan Fungsi Legislasi;
- Pemanfaatan Fungsi Anggaran yang digunakan;
- Mengefektifkan Fungsi Pengawasan DPRD;

- Membantu Menyusun Perda Inisiatif DPRD yang mewakili aspirasi Masyarakat;
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Berikut Pemetaan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah dalam rangka Rumusan Isu Strategis

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya Fasilitasi Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD Kabupaten Bangka Tengah	Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Profesional	Kurangnya kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui Diklat;
		Keterbatasan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK)	Pengadaan sarana prasarana TIK PD belum merata
			Anggaran Belanja TIK Terbatas
		Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD yang tidak optimal	Padatnya jadwal kegiatan DPRD

#### D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung

Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2024 (lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 330/Noreg 11.43/2024) tertanggal 11 Oktober 2024;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2024 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 (berita daerah kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1425) tertanggal 11 Oktober 2024
5. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

## E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah :

- |         |  |
|---------|--|
| BAB I   | PENDAHULUAN  |
|         | Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II  | PERENCANAAN KINERJA  |
|         | Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu   |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA  |
|         | Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan     |
| BAB IV  | PENUTUP  |

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**  
*A. Rencana Strategis*  
*B. Rencana Kinerja Tahun 2023*  
*C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023*

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang

bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan -

tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## **1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bangka Tengah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas

Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang Semakin Unggul ”

## **2. Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan SDM yang unggul dan berkualitas berdasarkan iman dan taqwa ;

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan melalui IPTEK ;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata;
4. Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan ;
5. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul.

Perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah mengacu pada Misi ke-5, yaitu :

**Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul**

### **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebanyak 1 tujuan dan 3 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut :



**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah**  
**Kabupaten Bangka Tengah**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target % Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tercapainya Pelayanan Berkualitas terhadap Anggota DPRD	Meningkatnya kepuasan layanan Terhadap Anggota DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	n/a			80	81	81.5	81.7
	Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat DPRD	Persentase Hasil Evaluasi RB	n/a			74.90	74.92	75	75.10

*Sumber : Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2021-2026*

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Tercapainya Pelayanan Berkualitas terhadap Anggota DPRD	1.1.	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks		Indeks Kepuasan Anggota DPRD	Sekretaris DPRD
	Meningkatnya kepuasan layanan Terhadap Anggota DPRD						
2.	Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat DPRD	2.1	Persentase Hasil Evaluasi RB	%		Persentase Hasil Evaluasi RB oleh Inspektorat	LHE RB Inspektorat

*Sumber : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024*

## B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahun 2024**  
**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Pagu Anggaran	
					APBD 2024	APBDP 2024
Tercapainya Pelayanan Berkualitas terhadap Anggota DPRD	Meningkatnya kepuasan layanan Terhadap Pelayanan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	81	39.917.300.000	30.281.292.000
	Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat DPRD	Persentase Hasil Evaluasi RB	%	74.92	21.767.532.750	24.114.410.000

*Sumber : Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024*

## C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan

Perjanjian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 1 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten**  
**Bangka Tengah Tahun 2024**

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
Tercapainya Pelayanan Berkualitas terhadap Anggota DPRD	Meningkatnya kepuasan layanan Terhadap Anggota DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	81
	Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat DPRD	Persentase Hasil Evaluasi RB	%	74.92

*Sumber : Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

**Tabel 2.5**

**Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN INDUK
1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip OPD	76	24.053.472.750
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	20.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	2.583.142.000
	Administrasi barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase cakupan Layanan Administrasi BMD	80%	10.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase cakupan pelayanan administrai kepegawaian perangkat daerah	100%	25.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesentase Cakupan Administrasi Perkantoran	100%	416.700.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	286.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan jasa peunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.002.960.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase cakupan Pemeliharaan Barang	100%	664.650.000

	Daerah	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase cakupan Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	16.016.820.750
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pembahasan Anggaran	100%	1.028.200.000
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan OPD</b>	<b>100%</b>	<b>39.917.300.000</b>
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah DPRD	100%	65.000.000
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Pengawasan dan Anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD	100%	2.366.710.000
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	100%	948.250.000
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Perjalanan Dinas	100%	36.537.340.000

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024*

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Namun pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Tengah tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja. Namun untuk anggarannya mengalami peningkatan pada saat APBDP Tahun Anggaran 2024. Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Perubahan Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip OPD	76	24.114.410.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	20.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	93%	2.671.325.000
	Administrasi barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase cakupan Layanan Administrasi BMD	80%	10.000.000

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase cakupan pelayanan administrai kepegawaian perangkat daerah	98%	25.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesentase Cakupan Administrasi Perkantoran	99%	401.700.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.250.316.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan jasa peunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.014.976.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99%	697.523.000
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase cakupan Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	16.046.000.000
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pembahasan Anggaran	100%	977.570.000
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan OPD</b>	<b>91%</b>	<b>30.281.292.000</b>
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah DPRD	100%	65.000.000
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Pengawasan dan Anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD	100%	1.822.142.000



	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	100%	530.000.000
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Perjalanan Dinas	100%	27.864.150.000

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)*

### *BAB III*

- A. Kuntabilitas Kinerja*
- B. Capaian Kinerja Organisasi*
- C. Realisasi Anggaran*
- D. Tingkat Efisiensi Penggunaan sumber daya*

## **BAB III**

### **A. KUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan

akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan

pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

## B. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Tahun 2024**

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Tercapainya Pelayanan Berkualitas terhadap Anggota DPRD	Meningkatnya kepuasan layanan Terhadap Anggota DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	81	80.2	99.01	Cukup	Sekretaris DPRD
		Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat DPRD	Persentase Hasil Evaluasi RB	74.92	74.86	99.92	Cukup	LHE RB Inspektorat

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut ;

a. Indikator Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Pada tahun 2024 pada indikator Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD mempunyai target 81, dengan realisasi Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD adalah 80.2% dengan capaian 99.01%. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung indeks dengan menjumlahkan hasil perkalian nilai persepsi dengan nilai penimbang, kemudian dibagi dengan total penimbang dari seluruh pertanyaan . Total dari nilai persepsi per unsur dibagi dengan total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang. Dengan nilai rata-rata tertimbang yaitu jumlah bobot dibagi jumlah unsur =  $1/14 = 0,071$ . Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus:  $\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$  Responden yang disurvei adalah seluruh anggota DPRD.

Keberhasilan pada indikator ini diperoleh karena adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPRD. Dan juga kinerja alat kelengkapan DPRD yang selalu bertumpu pada Tata Tertib DPRD, hal ini tercermin dari kepatuhan alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang berpedoman pada jadwal kegiatan yang sudah disusun oleh Badan Musyawarah.

b. Indikator Persentase Hasil Evaluasi RB

Pada indikator Persentase Hasil Evaluasi RB memiliki target indikator 74.92% dengan realisasi 74.86% dengan capaian 99.92%. Adapun nilai ini diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi. Hasil penilaian ini didapat dari pemenuhan indikator pengungkit dengan target bobot 36.30 dan realisasi 27.17 atau sebesar 74.86%.

Keberhasilan pada indikator ini diperoleh karena tercapainya nilai 100% pada poin manajemen perubahan, deregulasi kebijakan , penataan dan penguatan organisasi , serta penataan manajemen SDM yang baik. Serta adanya penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik sesuai dengan kriteria dalam evaluasi RB.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja	2023			2024		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tercapainya Pelayanan Berkualitas terhadap Anggota DPRD	Meningkatnya kepuasan layanan Terhadap Anggota DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	80	79.80	98.62	81	80.2	99.01
2		Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat DPRD	Persentase Hasil Evaluasi RB	74.90	74.86	99.95	74.92	74.86	99.92

Uraian penjelasan tabel :

1. Indikator Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Pada tahun 2023 pada indikator Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD mempunyai target 80, dengan realisasi Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD adalah 79.80% dengan capaian 98.62%. Hal ini mengalami peningkatan baik dari segi target maupun capaian pada tahun 2024 yaitu pada indikator Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD mempunyai target 81, dengan realisasi Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD adalah 80.2% dengan capaian 99.01%.

Dari tabel diatas dapat diketahui terdapat kenaikan capaian dari tahun 2023 ke 2024 sebesar 0,39%. Keberhasilan pada indikator ini diperoleh karena adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPRD . Hal ini merupakan peningkatan capaian positif yang perlu ditingkatkan kembali ditahun yang akan datang.

2. Indikator Persentase Hasil Evaluasi RB

Pada tahun 2023 pada indikator Persentase Hasil Evaluasi RB mempunyai target 74.90% , dengan realisasi Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD adalah 74.86% dengan capaian 99.95%. Namun pada tahun 2024 indikator Persentase Hasil Evaluasi RB mengalami sedikit penurunan pada capaian yaitu sebesar 99.92 hal ini dikarenakan

belum ada Evaluasi RB pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat sehingga nilai yang di ambil masih mengikuti nilai tahun sebelumnya sebesar 74.86%.

Dari tabel diatas dapat diketahui terdapat sedikit penurunan capaian dari tahun 2023 ke 2024 sebesar 0,03%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan target dari tahun 2023 ke tahun 2024 namun belum diiringi dengan persentase hasil evaluasi RB tahun 2024.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	No. Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2		3	4	5	6=4/5*100
1	Tercapainya Pelayanan Berkualitas terhadap Anggota DPRD	Meningkatnya kepuasan layanan Terhadap Anggota DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	80.2	81.7	98.16
2		Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat DPRD	Persentase Hasil Evaluasi RB	74.86	75.1	99.68

Secara keseluruhan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 bila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada target akhir Renstra Tahun 2026 masuk kedalam kategori “Cukup”. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD” tingkat kemajuan 98.16% atau “Cukup”.
2. Pada Indikator Kinerja “Persentase Hasil Evaluasi RB” tingkat kemajuan 99.68% atau “Cukup”.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No.	No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Upaya yang telah dilakukan	Upaya Kedepan (2024)
1	Tercapainya Pelayanan Berkualitas terhadap Anggota DPRD	Meningkatnya kepuasan layanan Terhadap Anggota DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	81	80.2	99.01	Komitmen DPRD untuk membahas raperda dalam propemperda 2024 di semester kedua	Melakukan monitoring antara jadwal pembahasan Raperda dalam Banmus	Menyusun rencana kerja untuk fasilitasi pembahasan raperda per semester
							Adanya komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD dan koordinasi yang baik antar bagian dalam mengevaluasi permasalahan yang dihadapi	Adanya komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD dan koordinasi yang baik antar bagian dalam mengevaluasi permasalahan yang dihadapi	Menyusun rencana kerja untuk fasilitasi Pengawasan dan Anggaran
							Adanya komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD dan juga dengan TAPD	Adanya komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD dan juga dengan TAPD	Menyusun rencana kerja untuk fasilitasi Pengawasan dan Anggaran
							Adanya koordinasi yang baik antara Legislatif dan Eksekutif dalam mengakomodir aspirasi yang masuk dari masyarakat	Adanya koordinasi yang baik antara Legislatif dan Eksekutif dalam mengakomodir aspirasi yang masuk dari masyarakat	Menyusun rencana kerja terkait reses dalam mengakomodir aspirasi yang masuk dari masyarakat
2		Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat DPRD	Persentase Hasil Evaluasi RB	74.92	74.86	99.92	Adanya komitmen Sekretariat DPRD terhadap fasilitasi Anggota DPRD dan adanya komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD dan koordinasi yang baik antar bagian dalam mengevaluasi permasalahan yang dihadapi	Adanya maklumat pelayanan setra komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD dan koordinasi yang baik antar bagian dalam mengevaluasi permasalahan yang dihadapi	Menyusun rencana kerja untuk fasilitasi Pengawasan dan Anggaran



Dari tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator yang ada memiliki tingkat keberhasilan “cukup”. Hal ini dapat dilihat dengan seluruh capaian berada pada rata-rata penilaian  $80 < X < 100$ . Analisis Keberhasilan atas indikator diatas tidak lepas dari hal-hal berikut :

1. Adanya *deadline* untuk pembahasan raperda yang sudah dijadwalkan selesai pada akhir semester II (dua). Hal ini menunjukkan besarnya komitmen DPRD dalam melakukan pembahasan raperda sesuai dengan batas waktu yang sudah dijadwalkan.
2. Adanya komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD dan koordinasi yang baik antar bagian dalam mengevaluasi permasalahan yang dihadapi.
3. Adanya komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD (Banggar) dan juga dengan TAPD;
4. Adanya koordinasi yang baik antara Legislatif dan Eksekutif dalam mengakomodir aspirasi yang masuk dari masyarakat.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.6**  
**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No .	Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Tercapainya Pelayanan Berkualitas terhadap Anggota DPRD	Meningkatnya kepuasan layanan Terhadap Anggota DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	99.01	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan OPD	100	Menunjang
2		Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat DPRD	Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD	99.92	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Sakip OPD	73.7	Menunjang

Tabel Analisis Program/Kegiatan Sasaran :

Uraian Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Efisiensi
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah	Nilai Sakip SPD	24.114.410.000	19.986.096.558	82%	12%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	19.020.000	95%	5%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen yang disusun	15.000.000	14.020.000	99%	1%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang disusun	5.000.000	5.000.000	100%	0%
Administrasi keuangan Perangkat Daerah		Kinerja laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	2.671.325.000	2.276.359.019	85%	15%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Bulan Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	2.661.325.000	2.276.359.019	85%	15%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	5.000.000	4.740.000	94%	6%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.000.000	4.194.600	83%	17%
Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah		Persentase cakupan Layanan Administrasi BMD	10.000.000	9.270.000	99%	1%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	4.990.000	99%	1%
Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	4.280.000	85%	15%
Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		persentase cakupan pelayanan administratif kepegawaian perangkat daerah	25.000.000	11.830.650	47%	53%
Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	25.000.000	11.830.650	47%	53%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Cakupan Administrasi Perkantoran	401.700.000	377.440.749	93%	7%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	11.066.960	92%	8%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.000.000	99.879.800	99%	1%
Penyediaan Bahan Logistik kantor		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	90.000.000	87.515.600	97%	3%
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan		Jumlah bulan Penyediaan barang Cetak dan Pengadaan	44.700.000	26.500.000	59%	41%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	55.000.000	54.410.000	98%	2%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000	98.068.389	98%	2%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>2.250.316.000</b>	<b>799.340.000</b>	35%	65%
Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	211.240.000	189.640.000	89%	11%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di sediakan	2.030.076.000	600.700.000	30%	70%
Pengadaan Peralatan mesin dan lainnya	Jumlah Unit Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di sediakan	9.000.000	9.000.000	100%	0%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>1.014.976.000</b>	<b>942.964.701</b>	92%	8%
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Bulan Pelayanan Surat Menyurat	462.672.000	431.839.069	93%	7%
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	185.000.000	153.424.068	82%	13%
Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	367.304.000	357.701.564	97%	3%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>697.523.000</b>	<b>533.653.594</b>	76%	24%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas jabatan	305.318.000	201.552.519	66%	34%
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan	Jumlah bulan pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	292.205.000	244.880.675	83%	12%
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin lainnya	60.000.000	47.709.750	79%	21%
Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Luas Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	40.000.000	39.510.650	98%	2%
<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>		<b>16.046.000.000</b>	<b>14.134.662.574</b>	88%	12%
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Bulan Pelayanan Gaji dan Tunjangan DPRD	15.383.280.000	13.477.348.884	87%	13%
Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Jumlah Pakaian dinas dan atribut DPRD	247.620.000	245.220.000	99%	1%
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD	415.100.000	412.093.690	99%	1%
<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase Pembahasan Anggaran</b>	<b>977.570.000</b>	<b>881.555.271</b>	93%	7%
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah bulan penyediaan administrasi keanggotaan DPRD	288.920.000	268.285.957	97%	3%

Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah rapat paripurna yang terselenggara	688.650.000	613.269.314	89%	11%
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase Cakupan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>30.281.292.000</b>	<b>26.691.327.437</b>	88%	12%
<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah</b>	<b>65.000.000</b>	<b>0</b>	0%	100%
Fasilitasi penyusunan penjelasan/ keterangan dan/atau naskah akademik	Jumlah penjelasan/keterangan dan naskah akademik yang disusun	65.000.000		0%	100%
<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pengawasan dan Anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD</b>	<b>1.822.142.000</b>	<b>1.720.330.691</b>	94%	<b>6%</b>
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimbingan Tehnis yang dilaksanakan	1.000.000.000	959.114.899	95%	5%
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumentasi yang disebarluaskan	151.590.000	138.530.000	91%	9%
Penyediaan kelompok pakar dan Tim ahli	Jumlah tenaga ahli pimpinan DPRD	108.000.000	99.000.000	91%	9%
Penyediaan Tenaga ahli fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	462.552.000	426.175.792	92%	8%
Penyusunan Program kerja DPRD	Jumlah Rapat Alat kelengkapan DPRD yang diselenggarakan	100.000.000	97.510.000	97%	3%
<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Jumlah Dialog Yang Terlaksana dengan tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama</b>	<b>530.000.000</b>	<b>469.293.166</b>	88%	<b>12%</b>
Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah Kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	50.000.000	9.750.000	19%	81%
Pelaksanaan Reses	Jumlah Kegiatan Reses yang terlaksana	480.000.000	459.543.166	95%	5%
<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase Perjalanan Dinas</b>	<b>27.864.150.000</b>	<b>24.501.703.580</b>	87%	<b>13%</b>
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	27.864.150.000	24.501.703.580	87%	<b>13%</b>

### C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>24.114.410.000</b>	19.986.096.558	82%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	19.020.000	95%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.671.325.000	2.276.359.019	85%
	Administrasi Barang Milik Daerah	10.000.000	9.270.000	99%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	11.830.650	47%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	401.700.000	377.440.749	93%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.250.316.000	799.340.000	35%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.014.976.000	942.964.701	92%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	697.523.000	533.653.594	76%
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	16.046.000.000	14.134.662.574	88%
	Layanan Administrasi DPRD	977.570.000	881.555.271	93%
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>30.281.292.400</b>	<b>26.691.327.437</b>	<b>88%</b>
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	65.000.000	0	0%
	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.822.142.000	1.720.330.691	94%
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	530.000.000	469.293.166	88%
	Fasilitasi Tugas DPRD	27.864.150.000	24.501.703.580	87%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran program dan kegiatan masuk kategori capaian Cukup karena berada pada rentang  $80 < X < 100$ .

#### D. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Esisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	Tercapainya Pelayanan Berkualitas terhadap Anggota DPRD	Meningkatnya kepuasan layanan Terhadap Anggota DPRD	81	80.2	81	30.281.292.000	26.691.327.437	88.14%	11.86%
2		Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat DPRD	74.92	74.86	74.92	24.114.410.000	19.299.433.922	87.43%	12,57%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Dari table di atas, dapat kita analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Adapun analisis atas efisiensi tersebut dapat kita uraikan sbb :

1. Sasaran pertama “ Meningkatkan kepuasan layanan Terhadap Anggota DPRD” dengan satu indikator dan persentase capaian sebesar 81% dan menggunakan anggaran dengan persentase capaian 88.14%. Terdapat efisiensi Keuangan sebesar 11.86%.
2. Sasaran kedua “Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat DPRD” dengan satu indikator dan persentase capaian 74.92% dan menggunakan anggaran dengan persentase capaian 97.43%. Terdapat efisiensi Keuangan sebesar 15%.

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/ kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA					21.836.150.000	19.986.096.558	82%	1%
2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	20.000.000	19.020.000	95%	5%
3		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.671.325.000	2.276.359.019	85%	15%
5		Administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	10.000.000	9.270.000	99%	1%
6		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	25.000.000	11.830.650	47%	53%
7		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	401.700.000	377.440.749	93%	7%
8		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	2.250.317.000	799.340.000	35%	7%
9		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	1.014.976.000	942.964.701	92%	8%
10		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	697.523.000	533.653.594	76%	24%
11		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	100%	100%	16.046.000.000	14.134.662.574	88%	8%
12		Layanan Administrasi DPRD	100%	100%	100%	977.570.000	881.555.271	93%	7%
13		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		100%	100%	100%	30.281.292.000	26.691.327.437	88%
14	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		100%	100%	100%	65.000.000		0%	100%
15	Peningkatan Kapasitas DPRD		100%	100%	100%	1.822.142.000	1.720.330.691	94%	6%
16	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100%	100%	100%	530.000.000	469.293.166	88%	12%
17		Fasilitasi Tugas DPRD	100%	100%	100%	27.864.150.000	24.501.703.580	87%	13%

## BAB IV

### PENUTUP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori cukup)
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 99.01% (kategori cukup)
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 99.52% (kategori cukup)



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 52.356.308.000,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 45.990.761.359,00 , dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 88.45% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 11,55%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah.

Koba, Januari 2025

Plt.Sekretariat DPRD,



Yulin, S.E.

Pembina (IV/a)

NIP 19761209 200604 2 018